

S. RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 serta penggantinya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang menyusun Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Sebagaimana Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2024 dalam menyusun Renja Perangkat Daerah arah kebijakan menyesuaikan tema RKPD yaitu Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan serta perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
 27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030;
 29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2024 - 2026;
 30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 31. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 32. Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
 33. Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 17);
 34. Surat Edaran Walikota Malang Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 35. Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/453/35.73.112/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja

Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Malang

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ;
- e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2024;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2024;
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Kerja (DPA-Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru beberapa bulan dilaksanakan.

Sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahap Penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan. berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Oleh karena itu, untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Kota Malang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BKAD Tahun 2024 – 2026 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Malang Tahun 2024-2026. Sesuai Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/453/35.73.112/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang, dimana tujuan BKAD sebanyak 1 (satu) yaitu Tercapaiannya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel dan sasaran sebanyak 2 (dua) sasaran dengan indikator sasaran yaitu :

1. Nilai SAKIP
2. Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK

Tingkat capaian efektifitas dan efisiensi program/ kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang pencapaian sasaran dituangkan ke dalam 3 (tiga)

program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan sebagaimana dilihat pada tabel 2.1.1 berikut:

Tabel 2.1.1
Realisasi Target Anggaran dan Kinerja Per Program Per Kegiatan Per Sub Kegiatan Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA		
	Target (T)	Realisasi (R)	%		Target (T)	Realisasi (R)	%
	74,489,875,460.00	28,287,879,916.00	37.98				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24,597,225,600.00	13,188,901,538.00	53.62	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100.00
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100.00
				Nilai survey kepuasan internal	80.40	80.93	100.62
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77,832,500.00	63,270,950.00	81.29	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54,890,000.00	44,193,600.00	80.51	Jumlah dokumen Renstra dokumen Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,280,000.00	10,265,850.00	99.86	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	8 dokumen	8 dokumen	100.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,662,500.00	8,811,500.00	69.59	jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	12 dokumen	12 dokumen	100.00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,954,572,335.00	7,915,809,752.00	44.09	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	100.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17,850,257,551.00	7,835,975,755.00	43.90	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	14 dokumen	14 dokumen	100.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104,314,784.00	79,833,997.00	76.53	Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan	500 SPM	525 SPM	105.00
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	94,880,000.00	55,998,800.00	59.02	Persentase Barang Milik daerah yang terinventarisir	100%	100%	100.00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	73,490,000.00	44,898,800.00	61.10	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	33 unit	33 unit	100.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21,390,000.00	11,100,000.00	51.89	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	2 dokumen	2 dokumen	100.00

MA

S.II-3

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN			Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	KINERJA		
	Target (T)	Realisasi (R)	%		Target (T)	Realisasi (R)	%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	647,291,434.00	522,571,260.00	80.73	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	100%	100.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	106,271,000.00	51,340,000.00	48.31	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 orang	60 orang	60.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	541,020,434.00	471,231,260.00	87.10	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	80 orang	80 orang	100.00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,569,913,500.00	1,970,551,272.00	76.68	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	100%	100.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,889,900.00	11,264,000.00	94.74	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis	6 jenis	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	894,011,300.00	874,756,325.00	97.85	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	56 jenis	56 jenis	100.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23,332,800.00	3,250,000.00	13.93	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental	1 kali	1 kali	100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	126,219,500.00	83,790,500.00	66.38	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	8 jenis	133.33
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70,510,000.00	34,847,500.00	49.42	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 surat kabar	3 surat kabar	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,443,950,000.00	962,642,947.00	66.67	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	120 kali	119 kali	99.17
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,207,242,665.00	1,105,079,307.00	91.54	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	100%	0.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,029,097,975.00	941,385,000.00	91.48	Jumlah peralatan gedung kantor	6 jenis	6 jenis	100.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178,144,690.00	163,694,307.00	91.89	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	2 jenis	1 jenis	50.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	912,320,066.00	812,571,788.00	89.07	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	379,217,000.00	341,571,500.00	90.07	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	39.000 surat	38.577 surat	98.92
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77,981,900.00	67,264,463.00	86.26	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139,734,696.00	124,756,750.00	89.28	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	2 jenis	100.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315,386,470.00	278,979,075.00	88.46	Luasan ruangan yang dibersihkan	1180m2	1180m2	100.00

71

S.II-4

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN			Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	KINERJA		
	Target (T)	Realisasi (R)	%		Target (T)	Realisasi (R)	%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,133,173,100.00	743,048,409.00	65.57	Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,133,173,100.00	743,048,409.00	65.57	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	38 unit	38 unit	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	43,435,792,400.00	11,179,232,563.00	25.74	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	0%	0.00
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,866,447,588.00	1,394,861,550.00	74.73	persentase Kkesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%	100%	100.00
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	139,101,200.00	90,162,500.00	64.82	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen Nota Kesepakatan	2 dokumen Nota Kesepakatan	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	113,120,000.00	102,223,750.00	90.37	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen Nota Kesepakatan	2 dokumen Nota Kesepakatan	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	371,540,000.00	344,602,950.00	92.75	Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	150,395,000.00	149,779,500.00	99.59	Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	913,625,388.00	574,112,850.00	62.84	Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	1 ranperda dan 5 Ranperwal	1 ranperda dan 5 Ranperwal	100.00
Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	178,666,000.00	133,980,000.00	74.99	Jumlah Peserta Pembinaan	132 orang	132 orang	100.00
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	581,873,274.00	507,064,345.00	87.14	Persentase kessuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100.00
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	329,210,000.00	319,581,845.00	97.08	Jumlah Dokumen laporan hasil penatausahaan keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	121,804,000.00	111,915,000.00	91.88	Jumlah dokumen SPD yang terbit	516 SPD	516 SPD	100.00

71

S.II-5

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN			Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	KINERJA		
	Target (T)	Realisasi (R)	%		Target (T)	Realisasi (R)	%
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	39,030,174.00	-	0.00	Jumlah Ranperwal yang tersusun	1 Ranperwal	0 Ranperwal	0.00
Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	91,829,100.00	75,567,500.00	82.29	Jumlah Peserta Pembinaan	190 orang	190 orang	100.00
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,220,422,000.00	604,700,700.00	49.55	Persentase L/K SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100.00
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1,001,137,000.00	488,971,700.00	48.84	Jenis dokumen laporan yang tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	109,280,000.00	99,729,000.00	91.26	Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	100.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	75,445,000.00	-	0.00	Jumlah dokumen yang tersusun	4 dokumen	0 dokumen	0.00
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	34,560,000.00	16,000,000.00	46.30	Jumlah Ranperwal yang tersusun	1 Ranperwal	0 Ranperwal	0.00
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	39,267,070,138.00	8,222,718,862.00	20.94	Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak	100%	100%	100.00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	39,267,070,138.00	8,222,718,862.00	20.94	Jumlah kali pendanaan darurat dan mendesak	5 kali	5 kali	100.00
Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	499,979,400.00	449,887,106.00	89.98	Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem informasi Pemerintahan Daerah	100%	100%	0.00
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	499,979,400.00	449,887,106.00	89.98	Jumlah entitas yang mendapat pembinaan	132 entitas	132 entitas	100.00

74

S.II-6

Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	ANGGARAN			Indikator Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	KINERJA		
	Target (T)	Realisasi (R)	%		Target (T)	Realisasi (R)	%
Kuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6,456,857, 460.00	3,919,745, 815.00	60.71	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD	0.90%	3.01%	334.4 4
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	6,456,857, 460.00	3,919,745, 815.00	60.71	Persentase kesesuaian Data Rincian Total BMD Dengan Aktiva Tetap Neraca Pemerintah Daerah	53.45%	53.45%	100.0 0
				Persentase BMD Berupa Tanah Yang Telah Bersertifikat	12.68%	20.04%	100.0 0
Penyusunan Standar Harga	19,360,000. 00	-	0.00	Jumlah ranperwal yang tersusun	1 ranperwal	0 ranperwal	0.00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	26,630,000. 00	-	0.00	Jumlah ranperwal yang tersusun	1 ranperwal	0 ranperwal	0.00
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	30,000,000. 00	-	0.00	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	0 dokumen	0.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah	407,048,000 .00	265,282,535 .00	65.17	Jumlah dokumen laporan Barang Milik Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100.0 0
Inventarisasi Barang Milik Daerah	225,826,000 .00	163,502,000 .00	72.40	Jumlah obyek aset dan barang milik daerah yang terinventarisasi	41 obyek	41 obyek	100.0 0
Pengamanan Barang Milik Daerah	2,951,056,2 60.00	1,364,633,6 80.00	46.24	Jumlah dokumen pengakuan aset tanah, Jumlah papan papan himbauan/patok yang terpasang, Jumlah sertifikat	100 dokumen, 100 papan, 2500 sertifikat	100 dokumen, 70 papan, 348 sertifikat	19.19
Penilaian Barang Milik Daerah	1,067,783,2 00.00	698,315,350 .00	65.40	jumlah dokumen hasil penilaian BMD	20 dokumen	17 dokumen	85.00
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	307,290,000 .00	272,200,000 .00	88.58	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	100.0 0
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	440,369,200 .00	281,205,250 .00	63.86	Jumlah Ijin yang diterbitkan	150 ijin	209 ijin	139.3 3
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	699,349,400 .00	656,362,000 .00	93.85	jumlah entitas peserta rekonsiliasi	132 entitas	132 entitas	100.0 0
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	46,729,600. 00	-	0.00	Jumlah Dokumen Laporan BMD	2 dokumen	2 dokumen	100.0 0
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	235,415,800 .00	218,245,000 .00	92.71	Jumlah entitas yang mendapat pembinaan	132 entitas	132 entitas	100.0 0

Sebagaimana tabel 2.1.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan;

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan adalah:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 60 orang dari target pada renstra 100 orang sehingga hanya tercapai 60%.
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 119 kali dari target pada renstra 120 kali sehingga hanya tercapai 99,17%.
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 1 jenis dari target pada renstra 2 jenis sehingga hanya tercapai 50%.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 38.577 surat dari target pada renstra 39.000 surat sehingga hanya tercapai 98,92%.

B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- a. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 1) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 0 Ranperwal dari target pada renstra 1 Ranperwal sehingga hanya tercapai 0%.
- b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 1 dokumen dari target pada renstra 4 Dokumen sehingga hanya tercapai 0%.
 - 2) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 0 Ranperwal dari target pada renstra 1 Ranperwal sehingga hanya tercapai 0%.

C. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1) Penyusunan Standar Harga
Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 0 ranperwal dari target pada renstra 1 ranperwal sehingga hanya tercapai 0%.

- 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 0 ranperwal dari target pada renstra 1 ranperwal sehingga hanya tercapai 0%.
- 3) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 0 dokumen dari target pada renstra 2 dokumen sehingga hanya tercapai 0%.
- 4) Pengamanan Barang Milik Daerah
Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 100 dokumen, 70 papan, 384 sertifikat dari target pada renstra 100 dokumen, 100 papan, 2500 sertifikat sehingga hanya tercapai 19,19%.
- 5) Penilaian Barang Milik Daerah
Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 17 dokumen dari target pada renstra 20 dokumen sehingga hanya tercapai 85%.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan;

Adapun Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran pada renstra yang direncanakan adalah:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 2 dokumen dari target pada renstra sebesar 2 dokumen.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 8 dokumen dari target pada renstra sebesar 8 dokumen.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 14 dokumen dari target pada renstra sebesar 14 dokumen.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 33 unit barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah dari target pada renstra sebesar 33 unit barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah.
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 2 dokumen dari target pada renstra sebesar 2 dokumen.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 80 orang sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya dari target pada renstra sebesar 80 orang sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya.

71

- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 6 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dari target pada renstra sebesar 6 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 56 jenis ATK dari target pada renstra sebesar 56 jenis ATK.
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 1 kali kegiatan dari target pada renstra sebesar 1 kali kegiatan.
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 3 surat kabar dari target pada renstra sebesar 3 surat kabar.
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 6 jenis peralatan kantor dari target pada renstra sebesar 6 jenis peralatan kantor.
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 12 bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik dari target pada renstra sebesar 12 bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik.
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 2 jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari target pada renstra sebesar 2 jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 1180m² Luasan ruangan yang dibersihkan dari target pada renstra sebesar 1180m² Luasan ruangan yang dibersihkan.
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 38 unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dari target pada renstra sebesar 38 unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara.
- B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

74

- Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 2 dokumen Nota Kesepakatan yang tersusun dari target pada renstra sebesar 2 dokumen Nota Kesepakatan yang tersusun.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 2 dokumen Nota Kesepakatan yang tersusun dari target pada renstra sebesar 2 dokumen Nota Kesepakatan yang tersusun.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun dari target pada renstra 1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun dari target pada renstra 1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 1 ranperda dan 5 Ranperwal yang tersusun dari target pada renstra sebesar 1 ranperda dan 5 Ranperwal yang tersusun.
 - 6) Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 132 orang peserta pembinaan dari target pada renstra sebesar 132 orang peserta pembinaan.
- b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 12 Dokumen laporan hasil penatausahaan keuangan yang tersusun dari target pada renstra sebesar 12 Dokumen laporan hasil penatausahaan keuangan yang tersusun.
 - 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 516 SPD yang terbit dari target pada renstra sebesar 516 SPD yang terbit.
 - 3) Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 190 orang peserta pembinaan dari target pada renstra sebesar 190 orang peserta pembinaan.
- c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 1) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 7 Dokumen laporan yang tersusun dari target pada renstra sebesar 7 Dokumen laporan yang tersusun.

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun dari target pada renstra sebesar 1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun.
- d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 5 kali BTT dari target pada renstra sebesar 5 kali BTT.
- e. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
- 1) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 132 entitas yang mendapat pembinaan dari target pada renstra sebesar 132 entitas yang mendapat pembinaan.
- C. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
- a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 12 dokumen laporan Barang Milik Daerah dari target pada renstra 12 dokumen laporan Barang Milik Daerah.
 - 2) Inventarisasi Barang Milik Daerah
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 41 objek dari target pada renstra sebesar 41 objek.
 - 3) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 5 dokumen laporan yang tersusun dari target pada renstra sebesar 5 dokumen laporan yang tersusun.
 - 4) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 132 entitas peserta rekonsiliasi dari target pada renstra sebesar 132 entitas peserta rekonsiliasi.
 - 5) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 2 dokumen laporan BMD dari target pada renstra 2 dokumen laporan BMD.
 - 6) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 132 entitas yang mendapatkan pembinaan dari target pada renstra sebesar 132 entitas yang mendapatkan pembinaan.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil Keluaran yang direncanakan;

Adapun Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil Keluaran pada renstra yang direncanakan adalah:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan ini terealisasi sebesar 525 SPM dari target renstra 500 SPM sehingga tercapai 105%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini terealisasi sebesar 8 jenis dari target renstra 6 jenis sehingga tercapai 133,33%.

B. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini terealisasi sebesar 209 Ijin yang diterbitkan dari target renstra 150 Ijin yang diterbitkan sehingga tercapai 139,33%

4. Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan dan Solusi Penyelesaiannya;

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BKAD Kota Malang selaku koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah. maka keberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak belum optimal capaian kinerja Satuan Kerja SKPD (Perangkat Daerah) dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan perencanaan anggaran dari program kegiatan kurang maksimal. Secara umum dapat diinformasikan beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi terkait dengan belum optimalnya capaian kinerja Perangkat Daerah antara lain :

- 1) Capaian kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendukung Opini BPK RI mencapai 100% dengan 12 (dua belas) kali pertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Meski demikian dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK - RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022 terdapat beberapa catatan khususnya terhadap pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah antara lain:

- a) Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan atas Pendapatan dan Belanja Tidak Melalui RKUD serta Hibah Langsung Tidak Memadai

- b) Pengelolaan keuangan daerah belum didukung dengan aspek regulasi yang memadai dan kebijakan akuntansi belum sepenuhnya sesuai dengan SAP
- c) Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tidak sesuai ketentuan
- d) Belanja BBM pada 9 Perangkat Daerah tidak didukung dengan bukti penggunaan yang memadai dan Pemakaian BBM melebihi Standar Harga Satuan

Atas catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) diatas BKAD melakukan upaya-upaya antara lain ;

- 1) Menyusun petunjuk teknis terkait kebijakan akuntansi antara lain :
 - a) Petunjuk teknis terkait mekanisme pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang tidak melalui RKUD dan hibah langsung baik uang maupun barang yang diterima Perangkat Daerah
 - b) Pencatatan piutang BPJS khususnya perlakuan akuntansi atas selisih pengakuan dan pencatatan piutang berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BPJS
 - c) Perlakuan atas penilaian asset tetap yang sebelumnya belum disajikan sesuai harga wajar
 - d) Invenstasi permanen dan pendapatan yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dicatat sebesar nilai laba perusahaan sesuai SAP
 - 2) Melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
 - 3) Menyusun rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Dan/Atau Alat Berat sebagai dasar bagi Perangkat Daerah Menyusun SOP mekanisme pengelolaan BBM mulai dari pengadaan, penggunaan dan pertanggungjawabannya.
 - 4) Melakukan rekonsiliasi pencatatan asset PSU dengan asset tanah bawah jalan dan asset tanah di bawah irigasi
 - 5) Melakukan pemisahan pencatatan KIB Gedung dan bangunan antara komponen bangunan fisik, penunjang utama dan penunjang lainnya.
 - 6) Pemutakhiran aplikasi SIMBADA yang mendukung penyajian asset tetap secara andal
 - 7) Melakukan verifikasi dan validasi piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- 2) Adanya beberapa update peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif antar K/L/D/I dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif terhadap outcome, benefit dan impact apabila peraturan tersebut diterapkan;

MA

- a. Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan utamanya tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi /pembinaan, bimtek/pelatihan/TOT dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah SKPD dan/atau mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis. Dengan demikian diharapkan aparatur dapat bersinergi demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Inovasi dan model-model aplikasi baru terkait pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan sebagai amanat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat sangat membutuhkan ketrampilan, keahlian, dan pengetahuan yang memadai bagi aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah. Namun demikian pencapaian inovasi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena dapat berpengaruh pada sistem pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan yang terintegrasi dengan SIPD yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri. SIPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 merupakan Sistem Informasi Yang Memuat Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Keuangan Daerah, serta Sistem Pemerintahan Daerah yang lain termasuk Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
- c. Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIMBADA masih memerlukan penyempurnaan. Mapping yang dilakukan Perangkat Daerah banyak mengalami kesulitan pada pencatatan persediaan terutama pada barang habis pakai yang teranggarkan pada masing-masing kegiatan. Hasil mapping memastikan data barang milik daerah telah sesuai dengan Neraca. Untuk itu diadakan pengembangan data base / aplikasi SIMBADA menuju versi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- d. Belum optimalnya kemampuan Perangkat Daerah dalam hal ini Subag Umum selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD dan Pengurus Barang Perangkat Daerah dalam pemahaman software aplikasi penatausahaan dan Laporan Barang Milik Daerah. Pemecahannya adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis serta asistensi /pendampingan kepada Satuan Kerja SKPD (Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Beberapa permasalahan yang diketengahkan merupakan kondisi yang masih terjadi dalam rangka aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan aturan pelaksanaannya. Sehingga dipandang perlu untuk terus melakukan pendampingan dan asistensi bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah.

- 3) Persentase tanah aset daerah yang telah bersertifikat sampai dengan tahun 2022 mencapai 20,07% (1710 bidang dari jumlah bidang seluruh aset daerah sebanyak 8.264). Pada Tahun 2022 sertifikat dalam proses pengajuan mencapai 974 bidang. Sehingga total tanah aset yang belum bersertifikat sebanyak 5.580 bidang. dengan luasan tanah yang bersertifikat 3.682.534 m² dari total 13.723.701 m². Kondisi tersebut terjadi kurang lebih masih banyak tanah yang merupakan aset Pemerintah Kota Malang tetapi tidak didukung/belum didukung data yang otentik, sehingga diperlukan penelusuran dan identifikasi aset, disertai penetapan alas hak-nya sebelum melakukan pendaftaran ke BPN untuk proses sertifikasi/status hukum asetnya.
- 4) Belum terbangun data single/data tunggal tanah aset daerah. Sampai saat ini belum tersusun roadmap dan mekanisme yang jelas dan terukur untuk konsolidasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan Nomor Tunggal Identitas aset tanah pada semua database dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah yang lebih akurat serta dalam rangka pencapaian Data Tunggal atas 4 (empat) database yang berbeda yaitu:
 - 1) Data base tanah pada Neraca Pemerintah Kota Malang;
 - 2) Database Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT);
 - 3) Database Retribusi Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
 - 4) Database hasil Inventarisasi Tanah Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Dengan tercapainya target program, maka pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berjalan dengan optimal sehingga mendukung nilai capaian dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu.
 - b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Dengan tercapainya target program, maka pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berjalan dengan optimal sehingga mendukung nilai capaian Laporan Keuangan SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI.
 - c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Dengan tercapainya target program, maka pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berjalan dengan optimal sehingga mendukung nilai capaian Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - 1) Pelayanan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah saat ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan

Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2020-2023 (sasaran 2: Prioritas yang harus terus dipelihara (a) Mempertahankan opini WTP dari BKP)

Sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Penganggaran

Perencanaan penyusunan anggaran disusun berdasarkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang. Selanjutnya berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) yang telah disetujui disusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) diinput kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD. Selanjutnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian obyek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

a) Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Penyiapan Anggaran Kas; Kepala SKPD Menyusun rencana anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan.
- 2) PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD dengan mempertimbangkan :
 - a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
 - b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
 - c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD
- 3) Penerimaan dan Penyetoran pendapatan
 - a. Rekonsiliasi Penerimaan
 - b. Penyetoran Pendapatan
- 4) Penatausahaan keuangan
 - a. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja
 - b. Permintaan Pembayaran
 - c. Perintah Membayar
 - d. Perintah Pencairan Dana

7 A

e. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran

b) Pelaporan

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah system yang mampu mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan system akuntansi.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan Akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri atas :

I. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD), terdiri atas :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

II. Entitas Pelaporan (SK-PKD) terdiri atas :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);

- 5) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Malang secara bertahap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akruwal menjadi SAP Berbasis Akruwal.

Manfaat penggunaan basis akuntansi akruwal bagi Pemerintah Daerah antara lain :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
3. Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik;
4. Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

2) Pelayanan Aset Daerah

Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi: inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset serta pengawasan serta pengendalian. Pengelolaan aset daerah merujuk kepada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Beberapa dapat diketengahkan terkait pelayanan pengelolaan aset daerah sebagai berikut:

- a. Kompleksitas permasalahan-permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah melatarbelakangi diterbitkannya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang memuat bagaimana mekanisme pencatatan pemanfaatan BMD dan penyajian Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu. Hasil laporan dalam penatausahaan BMD digunakan sebagai bahan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Output yang sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah adalah penatausahaan BMD melalui aplikasi e-BMD dalam satu system :
 - a. Persediaan (penerimaan, penyaluran persediaan)
 - b. Aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan irigasi, asset tetap lainnya, KDP)
 - c. Asset lainnya (Kemitraan pihak ketiga, ATB, asset lain-lain)
 - d. Akumulasi penyusutan/amortisasi,
sistem aplikasi e-BMD dengan output yang dihasilkan sudah mencerminkan seluruh format laporan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri 47 Tahun 2021.

MA

- b. Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap neraca daerah. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai histories/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah. Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya.
- c. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola/dikuasai pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik (public service), pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah (RKBMD) dan Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah (RKPBMMD) setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran; pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah.
- d. Terhadap dokumen benda-benda berharga dan aset daerah yang diinventarisasi, disimpan melalui sistem penataan arsip. Pada tahun 2013 telah dilakukan update dan pengembangan data SIGMA (Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset), dimana dalam sistem aplikasi ini data/obyek tersimpan berupa data tekstual maupun spacial yang dilengkapi titik-titik ordinat pada masing-masing obyek dan dapat diakses menggunakan perangkat berbasis Android. Penatausahaan pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan atau bangunan tersimpan dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT), dimana tanah aset daerah tersimpan per obyek dengan data tersaji secara tekstual dan spacial (obyek tersaji riil dilengkapi foto/dokumentasi serta peta).
- e. Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 5 (lima) Peraturan Walikota sebagai pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, maka pada tahun 2024 perlu dilakukan:

7 A

- 1) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang mendukung capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 6) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 7) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 8) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 9) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 10) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 11) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 12) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang mendukung capaian Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 13) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 14) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 15) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendukung capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 16) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang mendukung capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 17) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang mendukung capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 18) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendukung capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 19) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang mendukung capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 20) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendukung capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 21) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendukung capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 22) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 23) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang mendukung

3A

- capaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 24) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 25) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 26) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 27) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 28) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 29) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 30) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 31) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 32) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 33) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- 34) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 35) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 36) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 37) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 38) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 39) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang mendukung capaian Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 40) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 41) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyusunan Standar Harga yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 42) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 43) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 44) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 45) Merencanakan dan menganggarkan sub Inventarisasi Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 46) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 47) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 48) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 49) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 50) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 51) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 52) Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

34

Tabel 2.1.2 - Lampiran TC 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	KEUANGAN										
5	0 2	0 1									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	0 2	0 1	2.0 1								
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengangan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Handwritten signature or initials.

S.II-26

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0.00
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	9 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100.00
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	-	12 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	-
5 0 0 2.0 2 1 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bula n	12 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%	52 Orang/bula n	52 Orang/bula n	16.67
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 dokumen	430 SPM	500 SPM	525 SPM	105%	12 Dokumen	2 Dokumen	16.67
5 0 0 2.03 2 1	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7
1

S.II-27

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	19 unit	33 unit	33 unit	100%	12 Dokumen	2 Dokumen	16.67
5 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	-
5 0 0 2.0 2 1 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	132 Orang		100 orang	60 orang	60%			
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	40 orang	80 orang	80 orang	100%	80 orang	0 orang	0.00
5 0 0 2.0 2 1 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	1 Paket	1 Paket	100.00
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	74 jenis	56 jenis	56 jenis	100%	6 Paket	4 Paket	66.67

b 4

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 kali	1 kali	100%	1 Paket	0 Paket	0.00
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6 jenis	6 jenis	8 jenis	133%	1 Paket	0 Paket	0.00
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 surat kabar	3 surat kabar	3 surat kabar	100.00%	3 Dokumen	3 Dokumen	16.67
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	102 kali	120 kali	119 kali	99.17%	120 Laporan	15 Laporan	12.50
5 02 01 2.07 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	17 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	2 Unit	1 Unit	50.00
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	2 unit	-	2 jenis	1 jenis	50%	1 unit	1 unit	100%
5 02 01 2.07 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

M7A

S.II-29

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi 1 (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	39.982 surat	39.000 surat	38.577 surat	98.92%	1 Laporan	1 Laporan	16.67
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	3 Laporan	3 Laporan	16.67
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	3 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	1 Laporan	0 Laporan	0.00
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	750m2	1180m2	1180m2	100.00%	1 Laporan	1 Laporan	16.67
5 0 0 2.0 2 1 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	18 unit	38 unit	38 unit	100	38 Unit	10 Unit	26.32

45

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
5 0 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5 0 2 2	0 2 2	2.0 1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menginput penganggaran tepat waktu dan selaras dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 dokumen Nota Kesepakatan	2 dokumen Nota Kesepakatan	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0.00
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 dokumen Nota Kesepakatan	2 dokumen Nota Kesepakatan	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0.00
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0.00

S.II-31

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0.00
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	-	1 ranperda dan 5 Ranperwal	1 ranperda dan 5 Ranperwal	100%	6 Dokumen	0 Dokumen	0.00
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang	110 orang	132 orang	132 orang	100%	132 Orang	0 Orang	0.00
5 0 0 2.0 2 2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	2 Dokumen	16.67
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	56 Dokumen	31.518 dokumen	516 SPD	516 SPD	100	516 Dokumen	56 Dokumen	10.85

S.II-32

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	2 Dokumen	16.67
5 02 02 2.02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	2 Dokumen	16.67
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	-	1 Ranperwal	0 Ranperwal	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00

34

S.II-33

Kode Program/ Kegiatan					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	190 orang	190 orang	190 orang	100%	190 Orang	0 Orang	0.00
5	02	02	2.03	03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	7 Dokumen (7 LK Audited)	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Laporan	0 Dokumen	0.00
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0.00

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	0 dokumen	0%	4 Dokumen	0 dokumen	0.00
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Ranperwal	0 Ranperwal	0%	1 Dokumen	0 dokumen	0.00
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	190 orang							
5 02 02 2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	5 kegiatan	5 kali	5 kali	100	5 Laporan	0 Laporan	0.00
5 02 02 2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

fkr

S.II-35

Kode Program/ Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Lingkup Keuangan Daerah									
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang		132 entitas	132 entitas	100	132 Orang	0 Orang	0.00
5	0 2	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah, gedung dan bangunan	15,5M	0.38%	0.69%	0.38%	55.07	1.02%	0.05%	4.90
						Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 ranperwal	0 ranperwal	0%			
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 ranperwal	0 ranperwal	0%			
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		2 dokumen	0 dokumen	0%	2 Dokumen	0 Dokumen	0.00

Handwritten signature or initials.

S.II-36

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	12 Laporan	2 Laporan	16.67
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	98 objek.	41 obyek	41 obyek	100.00%	1 Laporan	0 Laporan	0.00
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	100 dokumen. 125 papan. 1308 sertifikat	100 dokumen, 100 papan, 2500 sertifikat	100 dokumen, 70 papan, 348 sertifikat	19.19%	3 Laporan	1 Laporan	33.33
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 dokumen	20 dokumen	17 dokumen	85%	10 Laporan	0 Laporan	0.00
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	2 Laporan	0 Laporan	0.00
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150 Dokumen	188 ijin	150 ijin	209 ijin	139.33%	150 Dokumen	36 Dokumen	24.00

S.II-37

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	132 Laporan	138 entitas	132 entitas	132 entitas	100	132 Laporan	0 Laporan	0.00
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan		2 dokumen	2 dokumen	100	2 Laporan	0 Laporan	0.00
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang	134 entitas	132 entitas	132 entitas	100	132 Orang	0 Orang	0.00

72

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah mencakup kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM (Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK (indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta merujuk pada Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan Kinerja. Evaluasi dan analisis dilakukan terhadap sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sebagaimana yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja yang disusun dan disampaikan dalam laporan interim triwulanan kepada Walikota Malang. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat diuraikan pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 - Lampiran TC 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK (INDIKATOR KINERJA KUNCI)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

42

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menetapkan 8 (delapan) Arah Kebijakan/Isu Strategis/Prioritas Daerah sebagai berikut:

- 1) Stunting
- 2) Kemiskinan
- 3) Birokrasi Yang Responsive dan Adaptif
- 4) Daya Saing SDM
- 5) Perlindungan Sosial dan Daya Beli
- 6) Tata Kota dan Branding
- 7) Kemudahan Berinvestasi
- 8) Pengendalian Inflasi

Dalam mendukung kinerja Tahun I (pertama) RPD Tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah mengampu 2 (dua) strategi/prioritas sebagai Utama yaitu Birokrasi Yang Responsive dan Adaptif dan Daya Saing SDM. Namun Badan Keuangan dan Aset Daerah mengampu 4 (empat) strategi/prioritas daerah lainnya yaitu (1) Stunting (2) Kemiskinan (3) Perlindungan Sosial dan Daya Beli, dan (4) Pengendalian Inflasi, yang didukung dari pendanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) bilamana dalam keadaan darurat/mendesak dan tidak/belum direncanakan oleh Perangkat Daerah pengampu.

Selain itu sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku SK-PKD dalam hal ini Kepala BKAD Kota Malang, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD ;
- b. Menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD ;
- c. Menyusun Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
- d. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Sebagai tindak lanjut, atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memfasilitasi penyusunan KUA-PPAS/KUA-PPAS Perubahan, Raperda APBD/Perubahan APBD, maka rencana program dan kegiatan serta belanja daerah Kota Malang diarahkan untuk mengurangi berbagai isu strategis antara lain kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan lingkungan hidup. Penerapan isu-isu strategis tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang sesuai bidang dan urusan masing-masing serta kondisi riil, antara lain :

1. Pendidikan; adanya tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah, diarahkan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua tanpa diskriminasi terutama masyarakat miskin dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan.

2. Kesehatan; diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, meningkatkan jumlah jaringan pelayanan kesehatan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat, meningkatkan perbaikan sarana dan prasarana serta mewujudkan perumahan sehat dengan sanitasi yang layak dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.
3. Lapangan Kerja; kebijakan yang diarahkan untuk mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan.
4. Pertanian; diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan petani, meningkatkan produktivitas, daya saing, serta pengamanan ketahanan pangan.
5. Koperasi; diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan usaha skala mikro, memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan, meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa serta meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.
6. Lingkungan Hidup; diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik; diarahkan untuk mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat; mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional; meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan kebijakan layanan publik.
8. Kesalehan Sosial; diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, menyelesaikan dan mencegah konflik antar-umat beragama, serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat.
9. Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender; diarahkan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; meningkatkan perbaikan angka indeks pembangunan Gender; terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak dan perempuan serta meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

10. Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga, diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.
11. Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminilitas; diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing; meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba serta mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan SKPD, maka sejak tahun 2017 pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengalami penyesuaian terhadap program-program kegiatan dan capaiannya sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan. Prinsip Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun berdasarkan urusan pemerintah daerah dan unsur dalam pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran berdasarkan indikator kinerja dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan di daerah, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu merupakan Sistem Informasi Yang Memuat Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Keuangan Daerah, serta Sistem Pemerintahan Daerah yang lain termasuk Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan yang kemudian mengalami perubahan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sebagai implementasi atas peraturan perundang-undangan diatas, Pemerintah Kota Malang menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2022 sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran antara lain:

1. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan aset daerah;
2. Sumberdaya Manusia pengelola aset daerah kurang memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan aset daerah;
3. Pengamanan terhadap aset daerah baik secara fisik, administrasi dan hukum belum maksimal;
4. Banyaknya aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah.

Sedangkan faktor pendorongnya adalah:

1. Profesionalisme pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung dengan sistem aplikasi
2. Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi
3. Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran SKPD, maka pelaksanaan program dan kegiatan mutlak harus dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan target kinerja. Undang-Undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Seiring itu pula perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang disusun Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah terus berbenah sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Pun rekomendasi BPK RI terkait pemeriksaan atas L/K Pemerintah Daerah menuntut ditindaklanjuti. BKAD selaku entitas pelaporan/ SK-PKD wajib untuk menyajikan pelaporan keuangan daerah yang handal sekaligus melakukan pengamanan terhadap aset daerah penuh ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. sesuai tujuan organisasi yaitu Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Perangkat Daerah yang telah disusun dengan melakukan analisis kebutuhan antara lain :

- 1) Belanja penyusunan regulasi penganggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 2) Belanja pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- 3) Belanja pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi Bendaharawan Umum Daerah;
- 4) Belanja pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- 5) Belanja pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi PPKD selaku SK-PKD;
- 6) Penganggaran Belanja darurat/mendesak melalui Belanja Tidak Terduga;

- 7) Penganggaran belanja tim percepatan penatausahaan asset daerah (penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah);
- 8) Penganggaran belanja Tim Inventarisasi Kepemilikan Tanah Aset Pemerintah Kota Malang, sebagai upaya pengendalian pemanfaatan aset daerah melibatkan unsur intansi vertikal terkait dan Aparatur Penegak Hukum (APH);
- 9) Belanja pengamanan BMD, meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik BMD berupa papan bicara/papan pengumuman kepemilikan asset dan/atau asset dalam proses penyelesaian hukum, dan pengamanan hukum peningkatan status hukum BMD melalui sertifikasi;
- 10) Belanja fasilitasi konflik pertanahan dan/atau bangunan aset daerah;
- 11) Belanja fasilitasi Penilaian Barang Milik Daerah, dalam rangka sewa dan/atau penghapusan;
- 12) Penganggaran belanja inventarisasi tanah dan bangunan Barang Milik Daerah;
- 13) Penganggaran belanja verifikasi dan validasi data asset Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai penggunaan dan peruntukannya.

~ A

Tabel 2.4.1 - Lampiran TC 31 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Kota Malang

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN				37,156,458,039.00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN				37,156,458,039.00		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Malang	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	11,925,864,864.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Malang	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	11,925,864,864.00		
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	1,602,488,000.00				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	1,602,488,000.00	
			Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	748,686,781.00				Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	748,686,781.00	
			Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	3,357,056,150.00				Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	3,357,056,150.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	130,928,600.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	130,928,600.00		

S.II-46

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	74,268,600.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	74,268,600.00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	56,660,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	56,660,000.00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	11,794,936,264.00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	11,794,936,264.00	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Malang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	11,705,027,416.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Malang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	11,705,027,416.00	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Malang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 dokumen	89,908,848.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Malang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 dokumen	89,908,848.00	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	41,590,000.00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	41,590,000.00	
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Malang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	41,590,000.00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Malang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	41,590,000.00	

51

S.II-47

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100.00%	748,686,781.00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100.00%	748,686,781.00	
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Malang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	63,804,000.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Malang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	63,804,000.00	
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Malang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	132 Orang	131,560,400.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Malang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	132 Orang	131,560,400.00	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Malang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	553,322,381.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Malang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	553,322,381.00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%	2,508,102,100.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%	2,508,102,100.00	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17,047,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17,047,000.00	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	535,444,600.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	535,444,600.00	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000.00	

S.II-48

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Malang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	206,650,500.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Malang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	206,650,500.00	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Malang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	58,430,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Malang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	58,430,000.00	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	1,640,530,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	1,640,530,000.00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	450,880,000.00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	450,880,000.00	
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	450,880,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	450,880,000.00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	848,954,050.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	848,954,050.00	
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	390,570,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	390,570,000.00	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	127,765,800.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	127,765,800.00	

79

S.II-49

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	82,590,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	82,590,000.00	
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	248,028,250.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	248,028,250.00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	1,110,018,000.00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	1,110,018,000.00	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	1,005,018,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	1,005,018,000.00	
21	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	105,000,000.00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	105,000,000.00	

71

S.II-50

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%	2,194,633,100.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%	2,194,633,100.00	
			Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan	100%	11,512,008,794.00			Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan	100%	11,512,008,794.00	
			Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	100%	1,278,371,000.00			Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	100%	1,278,371,000.00	
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang menginput penganggaran tepat waktu dan selaras dengan perencanaan	100%	2,194,633,100.00	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang menginput penganggaran tepat waktu dan selaras dengan perencanaan	100%	2,194,633,100.00	
22	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Malang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	124,390,000.00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Malang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	124,390,000.00	
23	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Malang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	113,533,100.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Malang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	113,533,100.00	
24	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Malang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	353,790,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Malang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	353,790,000.00	

74

S.II-51

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Malang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	157,325,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Malang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	157,325,000.00	
26	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Malang	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	983,760,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Malang	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	983,760,000.00	
27	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang	461,835,000.00	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang	461,835,000.00	
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	1,278,073,400.00	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	1,278,073,400.00	
28	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	421,072,800.00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	421,072,800.00	
29	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	56 Dokumen	149,785,500.00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	56 Dokumen	149,785,500.00	

7 A

S.II-52

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	56,719,750.00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	56,719,750.00	
31	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	53,619,750.00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	53,619,750.00	
32	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Malang	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	42,938,100.00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Malang	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	42,938,100.00	

7A

S.II-53

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
33	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	553,937,500.00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	553,937,500.00	
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu	tepat waktu	1,278,371,000.00	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu	tepat waktu	1,278,371,000.00	
34	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	590,963,400.00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	590,963,400.00	
35	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100,190,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100,190,000.00	

S.II-54

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
36	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	52,002,500.00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	52,002,500.00	
37	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Malang	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	35,775,000.00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Malang	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	35,775,000.00	
38	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	190 orang	499,440,100.00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	190 orang	499,440,100.00	
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Malang	Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak	100%	9,737,230,994.00	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Malang	Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak	100%	9,737,230,994.00	
39	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	9,737,230,994.00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	9,737,230,994.00	
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Malang	Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem informasi Pemerintahan Daerah	100%	496,704,400.00	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Malang	Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem informasi Pemerintahan Daerah	100%	496,704,400.00	

S.II-55

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
40	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	496,704,400.00	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	496,704,400.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah, gedung dan bangunan	15,5M	3,507,501,600.00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah, gedung dan bangunan	15,5M	3,507,501,600.00	
			Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan	100%	1,029,847,750.00			Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan	100%	1,029,847,750.00	
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya	100%	4,537,349,350.00	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya	100%	4,537,349,350.00	
41	Penyusunan Standar Harga	Kota Malang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	54,686,550.00	Penyusunan Standar Harga	Kota Malang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	54,686,550.00	
42	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	48,535,000.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	48,535,000.00	
43	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	70,680,000.00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	70,680,000.00	
44	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	181,465,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	181,465,000.00	
45	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	205,311,000.00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	205,311,000.00	

S.II-56

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
46	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	1,746,106,400.00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	1,746,106,400.00	
47	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	1,010,002,000.00	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	1,010,002,000.00	
48	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	164,290,000.00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	164,290,000.00	
49	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150 Dokumen	429,190,000.00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150 Dokumen	429,190,000.00	
50	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	132 Laporan	492,250,600.00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	132 Laporan	492,250,600.00	
51	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	47,599,600.00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	47,599,600.00	
52	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang	87,233,200.00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang	87,233,200.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan keuangan dan aset daerah, perwakilan perguruan tinggi, Lembaga/otoritas jasa keuangan, instansi vertical serta perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Malang di paparkan melalui Forum Perangkat Daerah (FPD) yang dilaksanakan oleh BAPPEDA pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertempat di Aria Gajayana Hotel Jalan Kawi No 24 Malang. Beberapa catatan penting dihasilkan dalam forum tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kota Malang dalam rangka pengamanan tanah aset daerah;
2. Inventarisasi tanah dan bangunan yang menjadi aset milik Pemerintah Kota Malang;
3. Integrasi sistem aplikasi pengelolaan keuangan dengan sistem aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkup Pemerintah Kota Malang;
4. Integrasi sistem aplikasi pengelolaan keuangan dengan sistem aplikasi Barang Milik Daerah yang di bangun Pemerintah Pusat;
5. Fasilitasi konflik pertanahan dan/atau bangunan aset daerah

Secara rinci dijelaskan dalam tabel T-C 32 sebagai berikut:

3 A

Tabel 2.5.1 - Lampiran TC 32 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No.	Program/Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengamanan Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Status Aset Daerah melalui sertifikasi - Pemasangan papan bicara - Penataan dan pemeliharaan arsip surat berharga daerah - Fasilitasi konflik pertanahan/bangunan aset daerah 	Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah bidang lahan aset daerah yang tersertifikasi - Pemasangan papan kepemilikan tanah aset daerah - Pemeliharaan dan penataan arsip - Fasilitasi/pengamanan fisik tanah/bangunan aset daerah yang dikuasai pihak lain 	401 bidang 70 buah 1.701 sertifikat, 1.809 BPKB, 7.381 IP	1.600.000.000	untuk capaian indikator 15.86% untuk capaian indikator 100% untuk capaian indikator 100%
2	Inventarisasi Tanah dan Bangunan Aset Daerah	tindak lanjut atas rekomendasi hasil inventarisasi di lapangan	Kota Malang	Jumlah obyek tanah aset daerah yang terinventarisasi	1.500 obyek	490.000.000	untuk capaian indikator 100%
3	Integrasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengembangan Integrasi dari Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah	BKAD Kota Malang	Jumlah Software yang terbangun	1 Software	400.000.000	untuk capaian indikator 100%
4	Penyusunan Regulasi Penganggaran Daerah	Penyusunan Ranperda/Ranperwal Penganggaran Daerah	BKAD Kota Malang	Jumlah Ranperda/Ranperwal	1 Ranperda dan 4 Ranperwal	983.760.000	untuk capaian indikator 100%

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, maka pada penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 telah mengalami penyesuaian terhadap program-program kegiatan dan capaiannya sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan.

- 1) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan di daerah, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami perubahan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sebagai implementasi atas peraturan perundang-undangan diatas, Pemerintah Kota Malang menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah nomor 5 Tahun 2022 pengganti Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka pengendalian jadwal Perencanaan dan Penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Walikota membentuk Tim Percepatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2020. Tim melakukan Langkah-langkah percepatan melalui integrasi proses antara lain:

- a. Proses penyusunan Perencanaan pembangunan daerah;
- b. Proses pengelolaan keuangan daerah (penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah);
- c. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- d. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada satu platform sistem informasi pemerintahan daerah.

Penjadwalan proses Perencanaan, Penganggaran dan Update Harga Satuan Barang sbb:

- Admin Perencanaan (BAPPEDA) mengelola jadwal proses Perencanaan dalam SIPD secara elektronik;
- Admin Keuangan (BKAD) mengelola jadwal proses penganggaran dengan update Standar Harga Satuan mengacu kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Untuk pemahaman terhadap SIPD, Tim mempelajari fungsi, muatan serta teknis operasi/akses melalui pembelajaran/bimbingan teknis dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri sebelum melakukan pendampingan teknis kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening untuk:

1. Neraca meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas;
2. Penyusunan Anggaran dan LRA meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Laporan Operasional (LO) meliputi Pendapatan-LO dan Beban

Prinsip Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun berdasarkan urusan pemerintah daerah dan unsur dalam pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran berdasarkan indikator kinerja dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3.2. Tujuan

Dengan telah disahkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024 – 2026, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026 yang didalamnya berisi tentang tujuan, sasaran dan kebijakan BKAD untuk periode 3 (tiga) tahun. Badan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan sebanyak 1 (satu) tujuan dan sasaran sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan indikator sasaran sebanyak 3 (tiga) indikator.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, Misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan. yaitu :

“Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel “

3. 3. Sasaran

3 f

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun yang berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mensinkronkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran dan kemampuan anggaran. Memperhatikan hal tersebut maka ditetapkan sasaran organisasi, yaitu :

- a. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel
- c. Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah
Dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :
 - 1) Nilai SAKIP
 - 2) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 3) Persentase Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD

Ketigaa sasaran dan indikator yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai apabila seluruh pegawai BKAD Kota Malang konsisten dan komitmen bersama-sama, saling bersinergi melaksanakan strategi secara tepat dan sistematis sesuai kemampuan sumber daya yang ada. Hasil analisis sasaran dan dukungan data menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang relevan sebagai prasyarat perbaikan strategi. Mendasari hal ini, untuk tiga tahun mendatang BKAD Kota Malang telah menetapkan suatu strategi yang secara rinci dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan.

3. 4. Program

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/ Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Mendasari ketentuan tersebut, BKAD dalam menyusun program kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi dan mendukung Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BKAD Kota Malang Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Periode 2024 - 2026 sebagaimana diuraikan pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah: Program Badan Keuangan dan Aset Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dari 3 (tiga) Program tersebut Program Pengelolaan Keuangan dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi Program Prioritas BKAD dimana program tersebut mempunyai irisan/crosscutting dalam menyelesaikan permasalahan secara kolaborasi antar Perangkat Daerah. Crosscutting terkait dengan 8 (delapan) Arah Kebijakan / Isu Strategis/Prioritas Daerah pada Tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah mengampu 2 (dua) strategi/prioritas sebagai Utama yaitu (1) Birokrasi Yang Responsive dan (2) Adaptif dan Daya Saing SDM. Namun Badan Keuangan dan Aset Daerah mengampu 4 (empat) strategi/prioritas daerah lainnya yaitu (1) Stunting (2) Kemiskinan (3) Perlindungan Sosial dan Daya Beli, dan (4) Pengendalian Inflasi, yang didukung dari pendanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) bilamana dalam keadaan darurat/mendesak dan tidak/belum direncanakan oleh Perangkat Daerah pengampu.

3. 5. Kegiatan

Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah meliputi:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
12. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
14. Pengelolaan Barang Milik Daerah

7 A

3. 6. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BKAD Kota Malang pada Tahun Anggaran 2024 diusulkan sebesar Rp. 37,156,458,039.00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari :

- 1 Belanja Operasional dan Belanja Modal sebesar Rp. 27.419.227.045,00 (termasuk belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 11.705.027.416,00)
- 2 Belanja Tidak Terduga. sebesar Rp. 9.737.230.994,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
KEUANGAN	37,156,458,039.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17,634,095,795.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130,928,600.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74,268,600.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56,660,000.00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,794,936,264.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,705,027,416.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89,908,848.00
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	41,590,000.00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	41,590,000.00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	748,686,781.00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	63,804,000.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	131,560,400.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	553,322,381.00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,508,102,100.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,047,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	535,444,600.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	206,650,500.00

7A

S.III-6

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58,430,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,640,530,000.00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450,880,000.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	450,880,000.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	848,954,050.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	390,570,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127,765,800.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82,590,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248,028,250.00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,110,018,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,005,018,000.00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105,000,000.00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14,985,012,894.00
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2,194,633,100.00
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	124,390,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	113,533,100.00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	353,790,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	157,325,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	983,760,000.00
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	461,835,000.00
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,278,073,400.00
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	421,072,800.00
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	149,785,500.00
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	56,719,750.00
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	53,619,750.00
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	42,938,100.00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	553,937,500.00
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,278,371,000.00
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	590,963,400.00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100,190,000.00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	52,002,500.00
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	35,775,000.00
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	499,440,100.00
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9,737,230,994.00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9,737,230,994.00
Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	496,704,400.00
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	496,704,400.00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4,537,349,350.00
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4,537,349,350.00
Penyusunan Standar Harga	54,686,550.00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	48,535,000.00
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	70,680,000.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah	181,465,000.00
Inventarisasi Barang Milik Daerah	205,311,000.00
Pengamanan Barang Milik Daerah	1,746,106,400.00
Penilaian Barang Milik Daerah	1,010,002,000.00
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	164,290,000.00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	429,190,000.00
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	492,250,600.00
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	47,599,600.00
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	87,233,200.00

7A

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan pada BAB II diatas serta tindaklanjut atas masukan stakeholder pada Forum Perangkat Daerah, maka dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah disusun dengan melakukan analisis kebutuhan atas perencanaan penganggaran pada Tahun 2024 antara lain :

- 1) Belanja penyusunan regulasi penganggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 2) Belanja pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- 3) Belanja pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi Bendaharawan Umum Daerah;
- 4) Belanja pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- 5) Belanja pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi PPKD selaku SK- PKD;
- 6) Penganggaran Belanja darurat/mendesak melalui Belanja Tidak Terduga;
- 7) Penganggaran belanja tim percepatan penatausahaan asset daerah (penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah);
- 8) Penganggaran belanja Tim Inventarisasi Kepemilikan Tanah Aset Pemerintah Kota Malang. sebagai upaya pengendalian pemanfaatan aset daerah melibatkan unsur intansi vertikal terkait dan Aparatur Penegak Hukum (APH);
- 9) Belanja pengamanan BMD, meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik BMD berupa papan bicara/papan pengumuman kepemilikan asset dan/atau asset dalam proses penyelesaian hukum, dan pengamanan hukum peningkatan status hukum BMD melalui sertifikasi;
- 10) Belanja fasilitasi konflik pertanahan dan/atau bangunan aset daerah;
- 11) Belanja fasilitasi Penilaian Barang Milik Daerah. dalam rangka sewa dan/atau penghapusan;
- 12) Penganggaran belanja inventarisasi tanah dan bangunan Barang Milik Daerah
- 13) Penganggaran belanja verifikasi dan validasi data asset Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai penggunaan dan peruntukannya.

Selanjutnya program, kegiatan dan indikator program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif tahun anggaran 2024, kelompok sasaran dan Pagu indikatif prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat disajikan sebagaimana pada tabel 4.1 tentang Lampiran TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 berikut:

S.IV-2

Tabel 4.1 Lampiran TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Badan Keuangan dan Aset Daerah					37.156.458.039,00							128.378.787.277,00	
	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					37.156.458.039,00							128.378.787.277,00	
	5	0	KEUANGAN					19.522.362.244,00							111.394.631.864,00	
1	5	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					14.985.012.894,00							106.236.521.348,00	
		0	Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan	-			100 %									
		0	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan				100 %									
		2	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI				100 %									

5/

S.IV-3

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	0	0	2.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menginput penganggaran tepat waktu dan selaras dengan perencanaan	-			100 %	2.194.633.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	2.148.496.131,00	
	2	2	01																
	5	0	0	2.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
	2	2	01	00	01														

74

S.IV-4

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	124.390.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		140.736.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 0 0 2. 00 2 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

71

S.IV-5

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	113.533.100,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		128.685.741,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.0001															Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

74

S.IV-6

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	353.790.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		400.698.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.00	00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
	5002.01	00														

74

S.IV-7

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	157.325.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		177.294.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.00	000109	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran													

74

S.IV-8

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	983.760.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		1.091.973.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 0 0 2. 00 2 2 01 13															Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

71

S.IV-9

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				132 Orang	461.835.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		209.106.240,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

7A

S.IV-10

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 0 2 0 2 02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				100 %	1.278.073.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	1.246.338.304,00	
	5 0 2 0 2 02 00 01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													

74

S.IV-11

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	421.072.800,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		480.654.198,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.00	0203	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD													

71

S.IV-12

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				56 Dokumen	149.785.500,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		125.755.230,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.00	00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya													
	5002.02	00														

S.IV-13

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	56.719.750,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		62.958.923,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.0006															Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

76

S.IV-14

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				12 Dokumen	53.619.750,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		59.517.923,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 0 0 2. 00	0 2 02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan													

76

S.IV-15

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	42.938.100,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		47.661.291,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.00	00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
	5002.00	00														

74

S.IV-16

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				190 Orang	553.937.500,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		469.790.739,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

79

S.IV-17

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 0 2 0 2 03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu	-		tepat waktu -	1.278.371.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	2.098.031.979,00	
	5 0 2 0 2 03 00 04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													

74

S.IV-18

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				7 Laporan	590.963.400,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		1.100.656.020,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 0 0 2. 00 2 2 03 05															Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

S.IV-19

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	100.190.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		129.648.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.00307						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah									

S.IV-20

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				4 Dokumen	52.002.500,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		84.362.775,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 0 0 2. 00	0 2 03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah													

S.IV-21

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	35.775.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		39.710.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.0011	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota													

74

S.IV-22

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				190 Orang	499.440.100,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		743.654.934,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

74

S.IV-23

No	Kode				Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	0	0	2.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak	-			100 %	9.737.230.994,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	100.000.000.000,00		
	2	2	04	00																09

74

S.IV-24

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				5 Laporan	9.737.230.994,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		100.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

34

S.IV-25

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	0 0 2. 00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	-			100 %	496.704.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	743.654.934,00	
5	0 0 2. 00	00 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													

3A

S.IV-26

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				190 Orang	496.704.400,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		743.654.934,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

34

S.IV-27

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	5	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan	-			15.5 Miliar Rupiah 100 %	4.537.349.350,00						-	5.158.110.516,00	
	5	0	0	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya	-			100 %	4.537.349.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	5.158.110.516,00	

79

S.IV-28

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												kan pendapatatan asli daerah				
	5 0 0 2. 00 2 3 01 01	Penyusunan Standar Harga														

71

S.IV-29

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	54.686.550,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		22.851.071,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.003		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah													

74

S.IV-30

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	48.535.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		31.895.850,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.0001	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah													

74

S.IV-31

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	70.680.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		81.784.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.000105		Penatausahaan Barang Milik Daerah													

34

S.IV-32

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	181.465.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		391.111.830,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 0 0 2. 00 2 3 01 06		Inventarisasi Barang Milik Daerah													

37 f

S.IV-33

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	205.311.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		224.631.810,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.00301007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

74

S.IV-34

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				3 Laporan	1.746.106.400,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		2.011.999.609,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.0001		Penilaian Barang Milik Daerah													

71

S.IV-35

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				10 Laporan	1.010.002.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		1.121.414.352,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.0001		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah													

74

S.IV-36

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	164.290.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		183.194.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													

74

S.IV-37

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				150 Dokumen	429.190.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		474.516.120,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.003011		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													

74

S.IV-38

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				132 Laporan	492.250.600,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		428.960.166,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.0012		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													

74

S.IV-39

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	47.599.600,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		52.835.556,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5002.0013		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													

7A

S.IV-40

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				132 Orang	87.233.200,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		132.914.952,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	X X		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						17.634.095.795,00							16.984.155.413,00	

74

S.IV-41

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	5 X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-			100 % 100 % 100 % 100 %	17.634.095.795,00						-	16.984.155.413,00	

7A

S.IV-42

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	X	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	-			100 %	130.928.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-	-	56.131.146,00	
	5	X	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	X	X	1	01	01															

S.IV-43

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	74.268.600,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		48.738.546,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 X X	0 1	2. 01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

34

S.IV-44

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	56.660.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		7.392.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

S.IV-45

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	X	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	-			100 %	11.794.936.264,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-	-	10.199.412.784,00	
	5	X	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
	X	X	1	02	01															

74

S.IV-46

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	11.705.027.416,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		10.097.698.173,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 X X	0 1	2. 02	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											

FA

S.IV-47

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500 Dokumen	89.908.848,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		101.714.611,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

74

S.IV-48

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	X	0	2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	-			100 %	41.590.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-	-	51.159.900,00		
	X	1	03																	
	5	X	0	2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD															
	X	1	03	00	02															

74

S.IV-49

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	41.590.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		51.159.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

7A

S.IV-50

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	X	0	2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	-			100 %	748.686.781,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-	-	1.015.375.608,00		
	X	1	05																	
	5	X	0	2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
	X	1	05	00	03															

71

S.IV-51

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	63.804.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		184.115.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	X X	0 1	2. 05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											

71

S.IV-52

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				132 Orang	131.560.400,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		185.991.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	X X	0 1	2. 05	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											

74

S.IV-53

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1							80 Orang	553.322.381,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-	645.268.308,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

71

S.IV-54

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	X	0	2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	-			100 %	2.508.102.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-	-	2.746.327.590,00	
	X	1	06																
	5	X	0	2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
	X	1	06	00															
				01															

79

S.IV-55

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.047.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		13.197.789,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 X X	0 1	2. 06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

39

S.IV-56

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	535.444.600,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		965.190.843,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	X X	0 1	2. 06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

74

S.IV-57

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		31.449.408,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 X X	0 1	2. 06	00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											

74

S.IV-58

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	206.650.500,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		158.685.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 X X	0 1	2. 06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											

7 A

S.IV-59

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	58.430.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		90.420.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 X X	0 1	2. 06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

71

S.IV-60

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	1.640.530.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		1.487.383.350,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

71

S.IV-61

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	X	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	450.880.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-	-	716.007.720,00	
	5	X	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		X	1	07	06														

74

S.IV-62

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	450.880.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		716.007.720,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

74

S.IV-63

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	X	0	2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	-			100 %	848.954.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-	-	1.012.122.305,00		
	X	1	08																	
	5	X	0	2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
	X	1	08	00	01															

S.IV-64

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	390.570.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		441.737.820,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 X X	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

S.IV-65

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	127.765.800,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		98.769.909,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 X X	0 1	2. 08	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

7A

S.IV-66

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	82.590.000,00	- Kota Malang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		140.009.513,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 X X	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

7A

S.IV-67

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	248.028.250,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		331.605.063,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

7.9

S.IV-68

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	5	X	0	2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	-		100 %	1.110.018.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-	-	1.187.618.360,00		
	X	1	09																
	5	X	0	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		X	1	09	00	02													

39

S.IV-69

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	1.005.018.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		1.058.634.972,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 X X	0 1	2. 09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

74

S.IV-70

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	105.000.000,00	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	-		128.983.388,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
J U M L A H								37.156.458.039,00							128.378.787.277,00	

TABEL 4.2
PEMETAAN SUB KEGIATAN SESUAI PEMUTAKHIRAN

No	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 100 100 100	% % % %	5.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 100 100 100	% % % %
2	5.02.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100	%	5.2.1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100	%
3	5.02.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	5.2.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen

39

S.IV-72

No	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	5.02.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	5.2.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan
5	5.02.01.202	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100	%	5.2.1.202	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100	%
6	5.02.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	Orang/bulan	5.2.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	Orang/bulan
7	5.02.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500	dokumen	5.2.1.202.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500	dokumen
8	5.02.01.203	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100	%	5.2.1.203	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100	%
9	5.02.01.203.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	5.2.1.203.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen
10	5.02.01.205	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100	%	5.2.1.205	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100	%

34

S.IV-73

No	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	5.02.01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	Dokumen	5.2.1.205.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	Dokumen
12	5.02.01.205.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	132	Orang	5.2.1.205.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	132	Orang
13	5.02.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80	Orang	5.2.1.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80	Orang
14	5.02.01.206	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100	%	5.2.1.206	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100	%
15	5.02.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.2.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket
16	5.02.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	5.2.1.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket
17	5.02.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.2.1.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket

34

S.IV-74

No	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1) 18	(2) 5.02.01.206.05	(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(4) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	(5) 2	(6) Paket	(7) 5.2.1.206.5	(8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(9) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	(10) 2	(11) Paket
19	5.02.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	dokumen	5.2.1.206.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	dokumen
20	5.02.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Laporan	5.2.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Laporan
21	5.02.01.207	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100	%	5.2.1.207	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100	%
22	5.02.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	5.2.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit
23	5.02.01.208	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100	%	5.2.1.208	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100	%
24	5.02.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	Laporan	5.2.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	Laporan

7A

S.IV-75

No	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1) 25	(2) 5.02.01.208.0 2	(3) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(4) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(5) 3	(6) Laporan	(7) 5.2.1.208.2	(8) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(9) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(10) 3	(11) Laporan
26	5.02.01.208.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	5.2.1.208.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan
27	5.02.01.208.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	5.2.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan
28	5.02.01.209	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	%	5.2.1.209	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	%
29	5.02.01.209.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	5.2.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit

S.IV-76

No	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1) 30	(2) 5.02.01.209.09	(3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(4) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	(5) 1	(6) unit	(7) 5.2.1.209.9	(8) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(9) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	(10) 1	(11) unit
31	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100	%	5.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100	%
			Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan	100	%			Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan	100	%
			Persentase L/K SKPD yang berkualitas mendukung opini BPK RI	100	%			Persentase L/K SKPD yang berkualitas mendukung opini BPK RI	100	%
32	5.02.02.201	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menginput penganggaran tepat waktu dan selaras dengan perencanaan	100	%	5.2.2.201	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menginput penganggaran tepat waktu dan selaras dengan perencanaan	100	%
33	5.02.02.201.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	5.2.2.201.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen
34	5.02.02.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	5.2.2.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen

7A

S.IV-77

No	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1) 35	(2) 5.02.02.201.07	(3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	(4) Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	(5) 2	(6) Dokumen	(7) 5.2.2.201.7	(8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	(9) Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	(10) 2	(11) Dokumen
36	5.02.02.201.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	5.2.2.201.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen
37	5.02.02.201.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4	Dokumen	5.2.2.201.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4	Dokumen
38	5.02.02.201.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132	Orang	5.2.2.201.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132	Orang
39	5.02.02.202	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	%	5.2.2.202	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	%

74

S.IV-78

No	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1) 40	(2) 5.02.02.202.01	(3) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	(4) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	(5) 12	(6) Dokumen	(7) 5.2.2.202.1	(8) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	(9) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	(10) 12	(11) Dokumen
41	5.02.02.202.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	56	Dokumen	5.2.2.202.3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	56	Dokumen
42	5.02.02.202.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	Dokumen	5.2.2.202.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	Dokumen
43	5.02.02.202.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	Dokumen	5.2.2.202.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	Dokumen

74

S.IV-79

No	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1) 44	(2) 5.02.02.202.10	(3) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	(4) Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	(5) 1	(6) Dokumen	(7) 5.2.2.202.10	(8) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	(9) Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	(10) 1	(11) Dokumen
45	5.02.02.202.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190	Orang	5.2.2.202.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190	Orang
46	5.02.02.203	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu	tepat waktu	-	5.2.2.203	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu	tepat waktu	-
47	5.02.02.203.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7	Laporan	5.2.2.203.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7	Laporan

79

S.IV-80

No	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1) 48	(2) 5.02.02.203.05	(3) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	(4) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	(5) 2	(6) Dokumen	(7) 5.2.2.203.5	(8) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	(9) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	(10) 2	(11) Dokumen
49	5.02.02.203.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4	Dokumen	5.2.2.203.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4	Dokumen
50	5.02.02.203.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	5.2.2.203.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen

71

S.IV-81

No	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1) 51	(2) 5.02.02.203.11	(3) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	(4) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	(5) 190	(6) Orang	(7) 5.2.2.203.11	(8) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	(9) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	(10) 190	(11) Orang
52	5.02.02.204	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak	100	%	5.2.2.204	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak	100	%
53	5.02.02.204.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5	Laporan	5.2.2.204.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5	Laporan
54	5.02.02.205	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100	%	5.2.2.205	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100	%
55	5.02.02.205.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190	Orang	5.2.2.205.3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190	Orang

No	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1) 56	(2) 5.02.03	(3) PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	(4) Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah, gedung dan bangunan	(5) 15,5	(6) Miliar	(7) 5.2.3	(8) PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	(9) Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah, gedung dan bangunan	(10) 15,5	(11) Miliar
			Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan	100	%			Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan	100	%
57	5.02.03.201	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya	100	%	5.2.3.201	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya	100	%
58	5.02.03.201.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen	5.2.3.201.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen
59	5.02.03.201.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	5.2.3.201.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen
60	5.02.03.201.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	5.2.3.201.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Dokumen
61	5.02.03.201.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12	Laporan	5.2.3.201.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12	Laporan
62	5.02.03.201.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan	5.2.3.201.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan
63	5.02.03.201.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3	Laporan	5.2.3.201.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3	Laporan

No	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1) 64	(2) 5.02.03.201.08	(3) Penilaian Barang Milik Daerah	(4) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	(5) 10	(6) Laporan	(7) 5.2.3.201.8	(8) Penilaian Barang Milik Daerah	(9) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	(10) 10	(11) Laporan
65	5.02.03.201.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Laporan	5.2.3.201.9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Laporan
66	5.02.03.201.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150	Dokumen	5.2.3.201.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150	Dokumen
67	5.02.03.201.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	132	Laporan	5.2.3.201.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	132	Laporan
68	5.02.03.201.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Laporan	5.2.3.201.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Laporan
69	5.02.03.201.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132	Orang	5.2.3.201.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132	Orang

34

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2024, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Malang Tahun 2024. Selain itu Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024.

Renja-Perangkat Daerah sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
- b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang disusun;
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian sasaran strategis.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja-Perangkat Daerah dalam penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan dan sasaran Perangkat Daerah melalui mekanisme Forum Perangkat Daerah yang melibatkan stakeholder/pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan rancangan Rencana Kerja, sehingga diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang maupun dengan K/L/D/I maupun masyarakat/pemangku kepentingan.

7 A